

PENEGAKAN HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI PERUMAHAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN
2020-2023

Oleh:
GHEFIRA NOOR FATIMAH
E1A019295

ABSTRAK

Mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses alih fungsi lahan sesuai dengan hukum Undan-Undang Nomor 41 tahun 2009, alih fungsi lahan pertanian yang telah dilaksanakan perlu menyediakan lahan pengganti sebagai syarat dalam proses alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penegakan Hukum Alih fungsi yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pengawasan serta penerapan sanksi, pengawasan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak pemerintah/aparat administrasi negara agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku serta sanksi diterapkan guna menegakkan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan bertujuan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, penelitian menggunakan metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang disajikan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi pustaka, data disajikan secara teks naratif dan metode analisis data menggunakan analisis isi. Berdasarkan hasil dan penelitian pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan mekanisme dan penegakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melaksanakan pengawasan pada pihak yang melaksanakan alih fungsi lahan.

Kata Kunci: *Mekanisme, Penegakan Hukum, Alih fungsi.*

*LAW ENFORCEMENT OF AGRICULTURAL LAND CONVERSION TO HOUSING
IN CILACAP REGENCY 2020-2023*

By:
GHEFIRA NOOR FATIMAH
E1A019295

ABSTRACT

The mechanism of conversion of agricultural land into housing can be carried out by the government and parties who have responsibility in the process of land conversion in accordance with the law of Law Number 41 of 2009, the conversion of agricultural land that has been implemented needs to provide replacement land as a condition in the process of transferring the function of sustainable food agricultural land Law Enforcement The transfer of functions carried out by the local government includes supervision and application of sanctions, supervision as an activity aimed at ensuring the attitude of government / state administration officials to run in accordance with applicable laws and sanctions are applied to enforce applicable laws.

This study aims to analyze the mechanism of conversion of agricultural land into housing in Cilacap Regency in accordance with Law Number 41 of 2009 and aims to analyze law enforcement carried out by the Cilacap Regency Regional Government to control the conversion of agricultural land into housing, research using empirical juridical methods, descriptive research specifications. The types and sources of data presented are primary and secondary data, data collection methods with observation, interviews and literature studies, data presented in narrative text and data analysis methods using content analysis. Based on the results and research, the Cilacap Regency government implements mechanisms and law enforcement with Law Number 41 of 2009 to supervise those who carry out land conversion.

Translated with DeepL.com (free version) Keywords: Mechanism, Law Enforcement, Change of function.